

ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

Nurhayati¹⁾

¹⁾Fakultas Ekonomi, Universitas Pasir Pengaraian
email : nurhayati12027.nh@gmail.com

Abstract

This study aims to provide information to the public regarding the presentation of the government's performance in achieving accountability. To determine the performance of RokanHulu district governments using financial ratios budget especially the ratio of local independence, the ratio the area of financial dependence, the ratio of effectiveness, efficiency ratio, the ratio of the ratio of the activity, the ratio of growth. Financial ratio analysis on revenue and expenditure budget for the 2009-2012 fiscal year as measured by ratio of local independence is very low, the ratio the area of financial dependence is very high, the ratio effectiveness of the fiscal year 2009-2012 is very effective while the efficiency ratio of the fiscal year 2009-2012 is very efficient, the ratio of the activity of the fiscal 2009-2012 which explains that the results routine spending is prioritized ratio compared to the ratio of development expenditure, and ratio of growth to aim increase in local revenues that fluctuate from year 2009-2012.

Keywords: The ratio of local independence, the ratio of effectiveness, efficiency ratio, the ratio of activity, the ratio of growth

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyajian laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pertanggungjawaban. Untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan rasio keuangan APBD khususnya Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan. Analisis Rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran 2009-2012 yang diukur melalui Rasio Kemandirian Daerah sangat rendah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah sangat tinggi, Rasio Efektivitas tahun anggaran 2009-2012 sangat efektif sedangkan Rasio efisiensi tahun anggaran 2009-2012 sangat efisien, Rasio Aktivitas tahun anggaran 2009-2012 yang menjelaskan bahwa hasil rasio belanja rutin lebih diprioritas dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan, dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2009-2012.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan propinsi melalui perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana

perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan daerah, semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Melalui laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan pemerintah daerah maka dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Sesuai Undang-Undang No.32 tahun 2004 maupun Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, secara signifikan telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah, baik sistem regulasi, urusan keuangan pertanggungjawaban dan sistem pengawasan. Khususnya dalam bidang keuangan daerah, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu juga diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut maka kabupaten Rokan Hulu diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harus bekerja sesuai aspirasi masyarakat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingganya rencana kerja pemerintah yang dituangkan dalam bentuk APBD harus melalui mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat, berpedoman pada masalah mendasar dan isu aktual serta dinamika yang berkembang ditengah masyarakat dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada.

Proram-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan asumsi, yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Implementasi dari APBD yang dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, dalam rangka pencapaian peningkatan kinerja dalam hal pengelolaan keuangan daerah khususnya yang menyangkut belanja daerah terutama pada bagian tata usaha keuangan untuk lebih meningkatkan penyusunan laporan

keuangan atas pelaksanaan anggaran daerah dan sesuai dengan bentuk dan standard yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara transparan dan harus dipertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam upaya terciptanya akuntabilitas keuangan publik, maka pemerintah harus melakukan beberapa hal dengan menerapkan prinsip penggolaaan keuangan daerah dan meningkatkan pengawasan anggaran sebagai bentuk untuk mewujudkan akuntabilitas di kabupaten Rokan Hulu.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian ini dengan tujuan dan untuk memberikan informasi kepada rakyat mengenai penyajian laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pertanggungjawaban .

KAJIAN TEORI

Bastian (2010) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikann informasi yang berguna untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan,

realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan. Komponen yang ada dalam laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Noordiawan, dkk (2007) secara spesifik menyatakan tujuan laporan keuangan pemerintahan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan .

Menurut Bastian (2005) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai dapat tertuang dalam perumusan penskemaan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi:

- a. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial.
- b. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan

publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

- c. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Untuk mengukur kinerja, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, kita dapat melakukannya dengan menghitung rasio keuangan yang meliputi:

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio maka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 1
Skala Interval
Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,00 -20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbag Depdagri Fisipol UGM dalam Yumardi

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah :

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Kriteria Penilaian
Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD Terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).

Rasio Efektivitas:

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Keuangan Daerah

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Dasril Munir dalam Yumardi

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektifitas PAD saja belum cukup. Meskipun dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di laporan realisasi anggaran, yaitu data tentang pemungutan PAD.

Rasio Efisiensi:

$$= \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD. Secara umum nilai indikator efisiensi PAD sebagai berikut:

Tabel 4
Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Dasril Munir dalam Yumardi

4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana

dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Belanja Rutin terhadap APBD:

$$= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD:

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD);

$$= \frac{PAD_{t_1} - PAD_{t_0}}{PAD_{t_0}}$$

Dimana :

t_0 = Tahun Awal

t_1 = Tahun Akhir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD pada Tahun Anggaran 2009 - 2012. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dikeluarkan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan daerah yang semakin tinggi

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

Berikut perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu

**Tabel 5
Tingkat Kemandirian Kab. Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009-2012**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian
2009	30.273.406.14 2,17	728.734.252.64 8,77	4,15%
2010	27.862.342.36 2,34	846.257.097.25 8,00	3,29%
2011	34.234.130.53 5,98	1.064.749.113. 109,00	3,22%
2012	54.369.713.92 2,02	1.176.285.682. 038,00	4,62%
Total	146.739.592.9 62,51	3.816.026.145. 053,77	3,85%

Sumber: Data Olahan

Dari perhitungan Tabel 5 terlihat bahwa selama periode 2009-2012 dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu masih sangat rendah bahkan mengalami naik turun dari tahun ketahun. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 4,62%, sedangkan yang paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,22%.

Berdasarkan tingkat rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu selama periode tahun anggaran 2009-2012 adalah 3,85 %. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.

**Tabel 6
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009-2012**

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Target PAD	Rasio KTKD
2009	728.734.252.648,7 7	769.748.633.790,9 4	94,67 %
2010	846.257.097.258,0 0	874.119.439.620,3 4	96,81 %
2011	1.064.749.113.109 ,00	1.099.910.243.644 ,98	96,80 %
2012	1.176.285.682.038 ,00	1.237.540.395.960 ,02	95,05 %
Total	3.816.026.145.053 ,77	3.981.318.713.016 ,28	95,85 %

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 6 diketahui Tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan yang membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah menunjukkan peningkatan persentase yang sedikit berfluktuatif. Pada tahun anggaran 2009 tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sebesar 94,67%, naik pada tahun anggaran 2010 menjadi 96,81%, kemudian turun pada tahun anggaran 2011 menjadi 96,80% dan pada tahun anggaran 2012 kembali turun menjadi 95,05%, tingginya persentase menunjukkan peningkatan ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

Secara umum, pada tahun anggaran 2009-2012 kendati tingkat ketergantungan keuangan daerah

Kabupaten Rokan Hulu terhadap pemerintah pusat menunjukkan persentase sedikit fluktuatif, namun hasil tersebut tidak mengalami perubahan secara signifikan. Perubahan persentase tetap masih berada pada kriteria yang sama. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap pemerintah pusat pada kurun waktu periode tahun anggaran 2009-2012 adalah 95,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan. Apabila diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat adalah Kabupaten dengan tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Sangat Tinggi.

3. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio efektifitas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat dihitung sebagai berikut:

**Tabel 7
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009-2012**

Tahun Anggaran	Rrealisasi PAD	Target PAD	Rasio Efektivitas
2009	30.273.406.142,1 7	23.638.846.870,0 0	128,07 %
2010	27.862.342.362,3 4	26.810.000.000,0 0	103,93 %
2011	34.243.130.535,9 8	34.661.025.788,0 0	98,79%
2012	54.369.713.922,0 2	40.453.786.310,0 0	134,40 %
Total	146.748.592.962, 51	125.563.658.968, 00	116,87 %

Sumber: Data Olahan

Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa rasio efektifitas Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2009-2012 berdasarkan tingkat efektivitas dari pendapatan daerah memiliki kecenderungan Sangat Efektif dengan tingkat efektivitas diatas 100 %, walaupun pada tahun 2011 dibawah 100% dengan jumlah 98,79% dengan perolehan rata-rata efektivitas pendapatan daerah tahun anggaran 2009-2012 sebesar 116,87% sesuai dengan Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga pencapaian ini perlu diperhatikan dan dipertahankan.

b. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Pemda dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin

baik. Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 8
Biaya Pemungutan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009-2012

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PAD	Realisasi PAD	Rasio Efisiensi
2009	192.020.000,00	30.237.406.142,17	0,64%
2010	230.230.000,00	27.862.342.362,34	0,83%
2011	243.230.000,00	34.243.130.535,98	0,71%
2012	243.230.000,00	54.369.713.922,02	0,45%
Total	908.710.000,00	112.469.462.426,53	0,81%

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 8 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2012, cukup efisiensi dari belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki kecenderungan cukup efisien, dengan tingkat efisiensi di bawah 100 %, yaitu 0,81%. Ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PAD sudah efisien yang ditandai dengan *trend* rasio yang kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100% dari tahun ketahun. Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang sangat baik.

4. Rasio Aktivitas (Rasio KecerAsian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat

cenderung semakin kecil. Rasio ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

Tabel 9
Realisasi APBD Kabupaten Rokan Hulu Kondisi Rasio Aktivitas Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2009-2012

Tahun Anggaran	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Pembangunan	Prioritas
2009	68,63%	30,94%	Belanja Rutin
2010	70,21%	29,69%	Belanja Rutin
2011	81,77%	18,11%	Belanja Rutin
2012	1,53%	26,39%	Belanja Rutin

Sumber : Data Olahan

Dari Tabel 9 dapat dilihat bahwa kondisi Rasio Aktivitas Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari Rasio keserasian pada Belanja Rutin yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 81,77% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 68,63%. Sedangkan Rasio Aktivitas pada Belanja Pembangunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 30,94% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 18,11%. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio Aktivitas Kabupaten Rokan Hulu diprioritaskan untuk Belanja Rutin.

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}}$$

Dimana :

t0 = Tahun Awal

t1 = Tahun Akhir.

1. Pertumbuhan PAD:

$$= \frac{27.862.342.362,34 - 30.273.406.142,17}{30.273.406.142,17} \times 100\%$$

2. Pertumbuhan PAD:

$$= \frac{34.243.130.535,98 - 27.862.342.362,34}{27.862.342.362,34} \times 100\%$$

3. Pertumbuhan PAD:

$$= \frac{54.369.713.922,02 - 34.243.130.535,98}{34.243.130.535,98} \times 100\%$$

Dari hasil tersebut dapat diketahui rasio Pertumbuhan Asli Daerah pada tahun 2009-2010 sebesar -7,96%, dan tahun 2010-2011 mengalami kenaikan menjadi 22,90% serta pada tahun 2011-2012 juga mengalami kenaikan menjadi 58,76%.

Dari data di atas menunjukkan bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2009 ke tahun 2010 hanya mencapai -7.96 % dengan kategori pertumbuhan yang tidak baik, artinya bahwa potensi yang ada pada sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah tidak dikelola secara maksimal.

Jika dilihat Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sebesar 22,90%, dari tahun sebelumnya namun masih pada kategori pertumbuhan yang cukup baik. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011 sedikit lebih baik diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi masyarakat semakin membaik sehingga terjadi kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban sebagai wajib pajak serta membayar retribusi atas penggunaan jasa-jasa fasilitas pemerintah daerah.

Dilihat Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun

2012 sebesar 58,76% , dan ada terjadi peningkatan, Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi yang menjadi sumber utama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009-2012 dengan hasil tingkat rata-rata sebesar 3,85 %, menggambarkan kinerja masih sangat rendah sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah
2. Rasio ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2009-2012 dengan hasil tingkat rata-rata sebesar 95,85%, menggambarkan kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya masih sangat tinggi dan belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan.
3. Rasio efektifitas Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2009 -2012 dengan perolehan rata-rata efektifitas pendapatan daerah tahun anggaran 2009-2012 sebesar

116,87 % sesuai dengan Kriteria Penilaian Efektifitas sangat efektif, sementara pada tahun 2011 sudah efektif. Sedangkan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun anggaran 2009 - 2012, cukup efisiensi dari belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki kecenderungan cukup efisien, dengan tingkat efisiensi di bawah 100 %, yaitu 0,81%. Ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan PAD sudah efisien hal ini terlihat dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang sangat baik.

4. Rasio Aktivitas` Kabupaten Rokan Hulu dilihat dari Rasio keserasian pada Belanja Rutin yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 81,77% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 68,63%. Sedangkan Rasio Aktivitas pada Belanja Pembangunan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 30,94% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 18,11%. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio Aktivitas Kabupaten Rokan Hulu diprioritaskan untuk Belanja Rutin.
5. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2009 ke tahun 2010 hanya mencapai -7.96 % dengan kategori pertumbuhan yang tidak baik, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sebesar 22,90%, dari tahun sebelumnya namun masih pada

kategori pertumbuhan yang cukup baik, dan Rasio Pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sebesar 58,76% , dan ada terjadi peningkatan, Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi yang menjadi sumber utama Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2009 ke tahun 2010 hanya mencapai -7.96 % dengan kategori pertumbuhan yang tidak baik, Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 sebesar 22,90%, dari tahun sebelumnya namun masih pada kategori pertumbuhan yang cukup baik, dan Rasio Pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sebesar 58,76% , dan ada terjadi peningkatan, Kondisi ini diakibatkan oleh meningkatnya pengelolaan pendapatan asli daerah pada sektor laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah milik pemerintah daerah, namun variabel pajak daerah serta retribusi yang menjadi sumber utama

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat terutama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebaiknya mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana ekstern atau bantuan pemerintah pusat dan provinsi dengan cara mengelola pemungutan

Pendapatan Asli Daerah secara spesifik, yaitu dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber yang dapat meningkatkan PAD sehingga potensi yang ada bisa dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu harus mengurangi pengalokasian untuk belanja rutin dan lebih meningkatkan untuk pengalokasian belanja pembangunan, sehingga pembangunan yang belum terealisasi bisa diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo, 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Edisi 4, Jakarta.

Azhar, Mhd Karya Satya, 2008. *Analisis Kinerja Keuangan/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah*, Departemen akuntansi pasca sarjana fakultas ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Astuti, Weni, 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Rokan Hulu*, Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian, Riau

Bastian Indra, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga. Yogyakarta.

-----, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi 3, Erlangga. Yogyakarta.

Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta.

Hidayat, Paidi dkk, 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No 3, Hal : 213-222.

Jusnawati, 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi PAD*, Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Noordiawan, dan Ayuningtyas Hertianti 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi dua, Salemba Empat, Jakarta.

-----, Dedi dkk, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba empat, Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 2010. *Menuju Kabupaten Terbaik di Provinsi Riau, Konsep dan Implementasi Good Governance Serta Pemberdayaan Masyarakat di Rokan Hulu*. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

**ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

- Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Yumardi, Febrina, 2010. *Analisis Kinerja Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*, Mahasiswa fakultas ekonomi, Universitas Riau, Riau.
- Sumarsono, Sonny, 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.